

Diskonektivitas Pembangunan dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,2 % dipastikan meleset karena outlook-nya diperkirakan hanya mencapai 5,05 % . Meskipun demikian perekonomian Indonesia dari triwulan pertama hingga akhir tahun pertumbuhannya stabil, tidak lain karena kebijakan campuran antara monetary policy dan fiscal policy berjalan baik tergambar dari laju inflasi semenjak Januari - Desember 2017 sebesar 3,61 % . Efeknya kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 % pada triwulan ketiga, kondisi serupa dialami oleh komponen investasi tumbuh 5,8 % , dan paling besar pertumbuhannya adalah ekspor mencapai 17,27 % . Tingginya pertumbuhan komponen ekspor menunjukkan sudah nampak sinyal perbaikan kinerja ekonomi global.

Sementara pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral (produksi) tumbuh paling tinggi rata-rata di atas 9 % adalah sektor yang terkait dengan jasa (informasi dan komunikasi, jasa lainnya serta jasa perusahaan). Sektor-sektor ini terbilang kurang elastis terhadap perbaikan ketimpangan dan kemiskinan, serta kurang menyerap tenaga kerja, berbeda halnya dengan sektor industri. Sayangnya sektor industri tumbuh belum ideal, hanya 4,84 % , meskipun begitu ia berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB. Jika direlevansikan dengan kondisi tumbuhnya investasi, maka dapat dibaca alokasi investasi sebagian besar bukan untuk kegiatan industri pengolahan. Selain sektor industri berkontribusi signifikan dalam pembentukan ekonomi nasional, ada sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,96 % , namun pertumbuhannya relatif kecil 2,92 % , dilain sisi distribusi tenaga kerja untuk sektor pertanian paling besar 29,68 % , sedangkan industri pengolahan distribusi tenaga kerjanya hanya 14,51 % .

Secara sekilas ekonomi nasional telah mengalami transformasi ekonomi jika

semata dilihat dari kontribusi sektor industri, akan tetapi proses transformasi kurang dibarengi dengan pergeseran struktur ketenagakerjaan. Tidak salah kemudian yang terjadi transformasi semu, apalagi struktur kegiatan ekonomi seperti ekspor masih mengandalkan produk sektor primer. Inilah tantangan nyata ekonomi yang membutuhkan perbaikan, dan itu bukan hanya tanggung jawab semata pemerintah pusat, pemerintah daerahpun harus memiliki komitmen yang kuat mendorong terjadinya transformasi ekonomi yang sesungguhnya, bukan transformasi semu (industri berkontribusi besar tetapi distribusi tenaga kerja pertanian dominan).

Lemahnya proses transformasi ekonomi memiliki dampak terhadap terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu saja, atau pulau yang telah mapan secara ekonomi (Jawa dan Sumatera) secara spasial kedua pulau tersebut berkontribusi sebesar 81,62 % . Menumpuknya kegiatan ekonomi di dua wilayah tersebut karena struktur ekonominya ditopang oleh sektor sekunder. Sementara kawasan Timur Indonesia sumbangannya hanya sebesar 18,38 % karena struktur ekonominya didominasi oleh sektor primer.

Masih kuatnya sektor primer dalam pembentukan ekonomi disebagian wilayah secara tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap kondisi fiskal, wilayah (daerah) yang sangat bergantung pada sektor primer (diluar tambang) penerimaan pajak dan bagi hasil hasil yang diterima rendah. Hal ini akan menyulitkan daerah leluasa melakukan inovasi pembangunan karena terbatasnya sumber pembiayaan diluar dana transfer. Pada saat yang bersamaan realisasi penerimaan pajak terbilang rendah dari target yang dipatok dalam APBN 2017. Rendahnya realisasi penerimaan pajak menjadi persoalan tersendiri karena jelas memiliki implikasi negatif terhadap pembiayaan



Oleh
Muh. Amier Arham

APBN, jika pengeluaran tetap digenjut (seperti pembangunan infrastruktur) dan tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dari pajak, maka dipastikan pemerintah akan menarik utang baru.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Rp. 1,283 triliun pada tahun 2017 maupun tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibaca sebagai kegagalan pemerintah dalam aspek kebijakan fiskal (perpajakan). Pembenahan administrasi perpajakan sudah cukup baik yang dapat menjadi landasan kuat untuk pembenahan kinerja sektor pajak dimasa mendatang, seperti agenda reformasi pajak, tax amnesty, akses informasi keuangan untuk kebutuhan perpajakan dan program pajak berturut. Setidaknya perbaikan landasan kebijakan perpajakan yang telah ditempuh oleh pemerintah akan menjadi pijakan kuat perbaikan ekonomi di tahun 2018. Dimana pajak menjadi determinan penting untuk membiayai berbagai program pemerintah, baik yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Menghadapi situasi target penerimaan pajak tidak tercapai, pemerintah tak mengurungkan niatnya membangun infrastruktur diberbagai daerah. Kebijakan pergeseran anggaran dari pembiayaan yang kurang produktif (subsidi) ke sektor infrastruktur sudah tepat, dan hasilnya menunjukkan infrastruktur strategis telah terbangun diberbagai tempat. Hanya saja perlu dicermati bahwa

pembangunan infrastruktur yang digenot identik dengan pembangunan konstruksi mengalami anomali, penyebabnya jumlah pekerja sektor konstruksi relatif mengalami penurunan dari 6,74 % menjadi 6,71 % (periode Agustus 2016 - Agustus 2017). Selain anomali, pembangunan infrastruktur saat ini kurang me-leverage pertumbuhan ekonomi, malah terjadi diskonektivitas pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol atau jalan yang dikembangkan di luar Pulau Jawa tidak terkait langsung dengan jalur distribusi di kawasan industri. Sementara problem ekonomi Indonesia berkaitan dengan lemahnya kinerja industri, idealnya infrastruktur dibangun tujuan utamanya untuk membuat biaya logistik makin murah dan kawasan industri menjadi bergairah. Sebagian ekonom menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi diangka 5 % karena lesunya kegiatan industri manufaktur. Pemerintah sejatinya mendesain ulang strategi pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan pengembangan jaringan infrastruktur ke kawasan industri.

Ada Optimisme Ekonomi di Tahun 2018

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 sebesar 5,4 % lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Sebagian memandang bahwa target pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan prediksi berbagai lembaga, seperti IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 % ditahun 2018, APINDO 5,2 % , INDEF 5,1 % dan LPEM FEB UI 5,3 % . Pandangan ini tidak keliru jika menengok pada tantangan ekonomi seperti penerimaan pajak yang tidak mencapai target, kebijakan pemotongan pajak di USA yang dapat menyebabkan perpindahan modal kesana disaat yang sama akan melemahkan nilai rupiah dan perlambatan sektor

industri manufaktur. Tentu saja target pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga kajian dan lembaga keuangan, sebab pemerintah wajib menciptakan optimisme dalam menghadapi situasi apapun termasuk menghadapi tiga tantangan di atas sehingga pelaku ekonomi tidak kuatir. Sembari pemerintah dituntut menyiapkan bantalan untuk mengantisipasi tantangan tersebut, sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dapat dicapai.

Menurut hemat saya, bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 % dapat tercapai bilamana pemerintah dapat mengelola ekonomi dengan baik, sebab peluang ekonomi di tahun 2018 terbuka lebar. Peluang pendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dapat dicatat beberapa indikator penting, diantaranya; 1) Pilkada serentak di 171 daerah, momentum Pilkada dimanfaatkan oleh partai politik dan kontestan membelanjakan uangnya yang cukup besar untuk membeli perlengkapan kontestasi, 2) Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat, status ini akan menarik investasi masuk ke Indonesia, 3) Harga komoditas meningkat yang menjadi andalan ekspor Indonesia, 4) Daya beli masyarakat naik, dengan catatan inflasi terjaga dengan baik, dan 5) Sektor pariwisata (leisure economy) meningkat dalam menghadapi momentum ASIAN Games di Indonesia. Namun demikian dibalik peluang yang terbuka terselip berbagai resiko yang perlu diwaspadai, kegiatan politik seperti Pilkada yang tidak terkelola dengan baik akan mengancam stabilitas politik, resikonya akan mengganggu kegiatan ekonomi. Selain itu, harga komoditas sekalipun telah mengalami kenaikan, tetapi belum signifikan dan resiko volatelite harga komoditas tetap mengintai setiap saat yang beresiko harganya turun kembali.

**Pengamat Ekonomi FE UNG*